

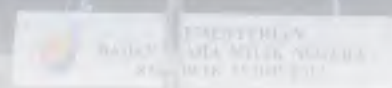


**KEBIJAKAN BUSINESS JUDGMENT
RULE DALAM PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEJABAT STRUKTURAL**

BUMN

(STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA)

Dr. Sudarna, S.E., S.H., M.H., M.M
M. Rezky Maulana, S.H., M.Kn



**KEBIJAKAN BUSINESS JUGMENT
RULE DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEJABAT
STRUKTURAL BUMN
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA
MALAYSIA)**

Penulis:

**Dr. Sudarna, SE., SH., MH., MM
M. Rezky Maulana, SH., M.Kn**

Editor:

Dr. Bambang Sugianto, SH. M.Hum



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**KEBIJAKAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT
STRUKTURAL BUMN
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA MALAYSIA)**

PENULIS:

**Dr. Sudarna, SE., SH., MH., MM
M. Rezky Maulana, SH., M.Kn**

EDITOR:

Dr. Bambang Sugianto, SH. M.Hum

TATA LETAK:

Wahyuni

DESAIN SAMPUL:

Muhammad Adhar, S.Kom

ISBN:

978-634-7193-45-2

CETAKAN PERTAMA:

Mei 2025

UKURAN:

v + 139 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

**Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
tdj.denarapublisher@gmail.com**

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

STIH SUMPAH PEMUDA PALEMBANG

Jl. Kol Anuman Achyad No. 1610, Palembang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **“Kebijakan Business Judgment Rule dalam Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Struktural BUMN (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)”** dengan baik.

Penulisan karya ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap pejabat struktural Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, khususnya dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Dalam praktiknya, sering kali para pejabat BUMN harus mengambil keputusan yang sulit dan strategis, yang jika tidak berhasil, dapat menimbulkan konsekuensi hukum, meskipun keputusan tersebut telah diambil secara itikad baik dan berdasarkan pertimbangan rasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Business Judgment Rule* menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam konteks perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia.

Penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan karya ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum korporasi dan perlindungan hukum terhadap pejabat BUMN.

KATA PENGANTAR

Ketua Program Studi Magister Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul **“Kebijakan *Business Judgment Rule* dalam Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Struktural BUMN (Studi Perbandingan Hukum Indonesia-Malaysia)”** dapat diterbitkan dan hadir di tengah-tengah pembaca.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan ilmu hukum yang kontekstual dan aplikatif, kami memandang bahwa penerbitan buku ini merupakan sebuah langkah penting dalam memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan tata kelola korporasi negara.

Melalui pendekatan *comparative legal study* antara Indonesia dan Malaysia, buku ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana *Business Judgment Rule* dapat berfungsi sebagai tameng hukum yang adil dan rasional dalam mendukung iklim pengambilan keputusan bisnis yang profesional dan berintegritas.

Dalam dunia korporasi modern, keberanian mengambil keputusan adalah denyut nadi kemajuan. Namun, keberanian itu harus didukung dengan kerangka hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga mendorong para pemimpin untuk bertindak tanpa rasa takut yang berlebihan terhadap risiko hukum, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan demi kepentingan terbaik perusahaan. Itulah semangat utama dari *Business Judgment Rule*.

Buku ini tidak hanya menyoroti aspek teoritis dari prinsip *Business Judgment Rule*, tetapi juga mengupas secara

komparatif bagaimana prinsip ini diterapkan di dua sistem hukum berbeda, yakni Indonesia dan Malaysia. Dengan pendekatan ilmiah yang kuat dan analisis yang tajam, karya ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum perlindungan pejabat struktural di lingkungan BUMN, yang selama ini kerap berada dalam dilema antara profesionalisme dan potensi risiko hukum.

Kami berharap kehadiran buku ini mampu menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta para pemangku kebijakan yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis di lingkup BUMN. Lebih dari itu, buku ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan hukum yang lebih adaptif, progresif, dan melindungi pejabat yang bekerja dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan dan negara.

Atas nama Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah menuangkan gagasan dan dedikasinya dalam buku ini. Semoga karya ini tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga sumber inspirasi bagi perubahan dan kemajuan hukum di Indonesia.

Palembang, Mei 2025

Ketua Program Studi Magister Hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

[Dr. Windi Arista, SH., MH.]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR Ketua Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PERBANDINGAN HUKUM	1
BAB II KARAKTERISTIK SISTEM CIVIL LAW DAN SISTEM COMMAN LAW	14
BAB III KEDUDUKAN HUKUM DAN “BUSINESS JUDGMENT RULE” DALAM PT. BUMN	30
A. Kedudukan Hukum dan Peran PT BUMN.	30
B. “Business judgment rule” dalam PT. BUMN	37
C. Duty of Care and Standard of care	40
D. Duty of Loyalty	44
E. Duty of Candor	46
BAB IV KEPUTUSAN BISNIS DITERAPKAN PADA PEJABAT STRUKTURAL BUMN GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN	49
A. Doktrin Keputusan Bisnis (Business judgment rule) Berdasarkan Hukum Korporasi Indonesia Dan Malaysia.	49
B. Pentingnya Pejabat Struktural BUMN mengambil keputusan bisnis dalam pengelolaan perseroan berdasarkan Hukum Korporasi di Indonesia dan Malaysia.	78
BAB V KEPUTUSAN BISNIS (BJR) DITERAPKAN DAN MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEJABAT STRUKTURAL BUMN BERDASARKAN HUKUM KORPORASI DI INDONESIA DAN MALAYSIA	98